

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)
TAHUN 2015

FEBRUARI

2016



DISNAKERSOS

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2015 ini, berpedoman kepada :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Nomor : 065/1730/Org, tanggal 6 Desember 2013.

Harapannya penyusunan laporan ini menggambarkan dengan jelas hasil pelaksanaan program dan kegiatan Disnakersos Kota Balikpapan, baik kendala maupun keberhasilannya, sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan di masa mendatang, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan sosial.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 12 Februari 2016

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL





DISNAKERSOS

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi.....	1
C. Aspek Strategis.....	2
1.4 Isu Strategis	3
BAB II Perencanaan Kinerja	4
BAB III Akuntabilitas Kinerja	7
A. Capaian Kinerja Organisasi	7
B. Realisasi Anggaran	12
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	19
BAB IV Penutup.....	13
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	14
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015	15
3. Rekapitulasi Anggaran 2015	16
4. Laporan Monitoring Bulanan 2015	17
5. SK TIM Penyusun LAKIP Disnakersos Kota Balikpapan Tahun 2015	27
6. Foto-foto Kegiatan Disnakersos Kota Balikpapan Tahun 2015	27



DISNAKERSOS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan.

RPJMD Kota Balikpapan periode 2011-2016 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih pada periode tersebut, selanjutnya dijadikan acuan dalam perencanaan pencapaian target kinerja SKPD yang dituangkan dalam Renstra.

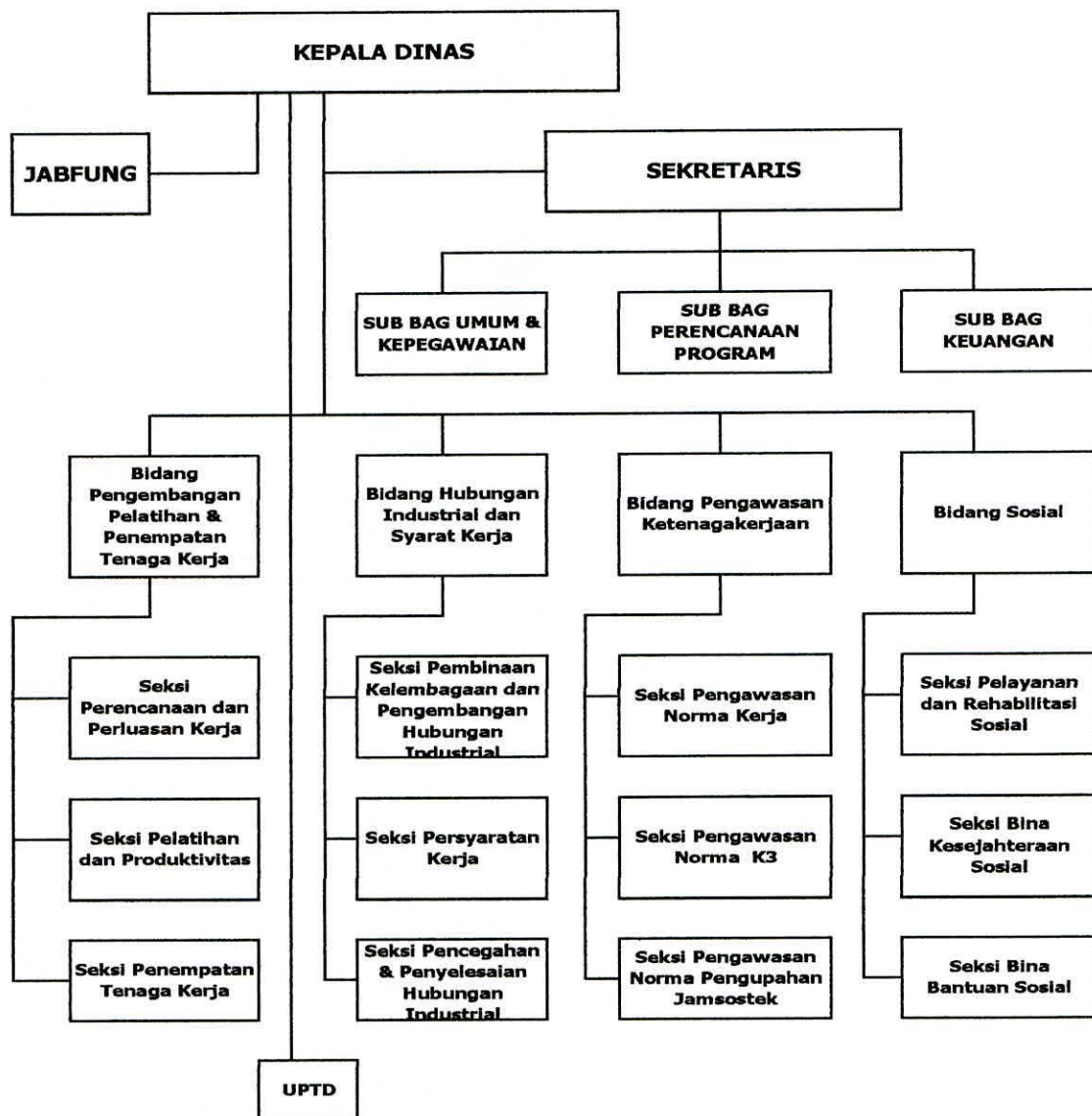
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Tahun 2015.

Laporan ini disusun sesuai format pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi menurut Wright dkk,(1996:188) merupakan bentuk cara di mana tugas dan tanggungjawab dialokasikan kepada individu, di mana individu tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen, dan divisi. Struktur tersebut seyogyanya senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan dalam rangka terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat.”

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2009, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan diatur sebagai berikut :



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan sebagai penyelenggara urusan bidang ketenagakerjaan dan bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Aspek-aspek strategis ketenagakerjaan meliputi : jumlah angkatan kerja, jumlah penempatan tenaga kerja, kualitas dan produktifitas tenaga kerja, jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jumlah pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja, jumlah tenaga kerja/ buruh yang telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Aspek strategis sosial meliputi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jumlah PMKS yang telah mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial, jumlah PMKS yang menerima bantuan program pemberdayaan kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Adapun aspek strategis bidang ketenagakerjaan dan sosial yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disnakersos Kota Balikpapan periode 2011-2016 :

- | | |
|--|--|
| a. Pengembangan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | 1. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| b. Hubungan Industrial dan Syarat Kerja | - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang selaras dan harmonis. |
| c. Pengawasan Ketenagakerjaan | - Pembinaan dan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. |
| d. Sosial | 1. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Peningkatan kemandirian PMKS. |

D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan tantangan bagi organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai langkah penyelesaiannya. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) bidang ketenagakerjaan maupun sosial yang dihadapi organisasi :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan;
3. Penurunan perselisihan hubungan industrial;
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di Kota Balikpapan, baik yang berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat.

Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan melalui pembinaan dan pengawasan perusahaan, baik dari segi norma kerja, norma K3, maupun norma lainnya.

Penurunan perselisihan hubungan industrial melalui peningkatan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik dalam bentuk penyuluhan, bimtek, sosialisasi, monitoring, hingga ke tahapan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui verifikasi dan validasi pendataan sasaran PMKS, pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, maupun pemberian bantuan tepat sasaran;

Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya pembinaan terhadap kelompok-kelompok KUBE, UEP sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan kelompok-kelompok usaha tersebut dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan PMKS secara paripurna.



DISNAKERSOS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Target kinerja Disnakersos Kota Balikpapan tahun 2015 sebagai manifestasi Rencana Strategis SKPD pada tahun ke-4 (periode 2011-2016) sekaligus perjanjian kinerja antara Wali Kota dengan Kepala SKPD, yaitu :

Tabel 2.1. Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2015

Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2015			
I.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	70%
		2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	65 %
II.	Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	46 %
III.	Penurunan perselisihan hubungan industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	54 %
IV.	Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	80%
V.	Peningkatan Kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	80%

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2015

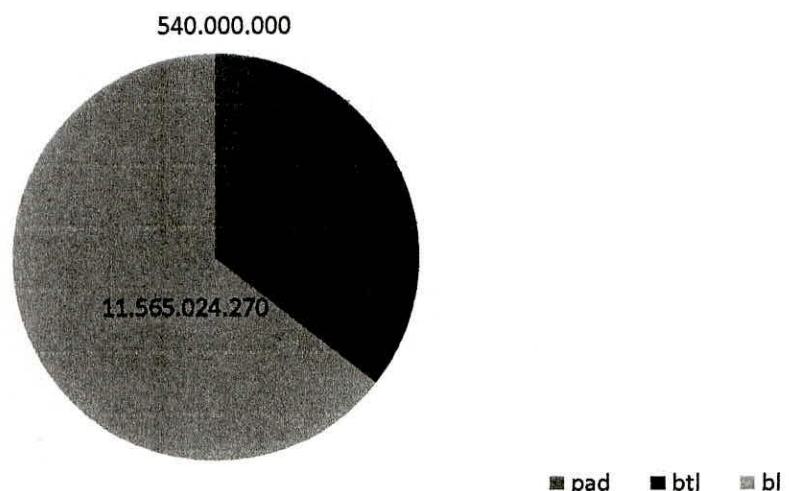
Penetapan Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2015			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	36
		2. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	98

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	20
		4. Angka beban tanggungan (Dependency Ratio)	-
		5. Angka Pengangguran	-
		6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	-
		7. Penyerapan tenaga kerja	-
		8. Angka kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja	Non Target
		9. Penggunaan peralatan K3 di perusahaan	1.300
		10. Lembaga K3 di perusahaan	45
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial	Jumlah panti/organisasi sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	33
3.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah masyarakat PMKS; 2. Partisipasi sosial lembaga masyarakat; 3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar 4. Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	10.700 53 1.650 33
		5. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30
4.	Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Angka Penyandang Masalah Sosial	10.700
		2. Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau sejenisnya	175

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana pilar	3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	259
		b. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana)	189

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, maka rincian program dan kegiatan Disnakersos Kota Balikpapan sebagai langkah dan upaya pencapaian target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas periode 2011-2016 dijabarkan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pembayaran Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp 540.000.000,- dengan asumsi jumlah obyek pembayaran retribusi sebanyak 38 warga negara asing per tahun.
2. Belanja Tidak Langsung Rp 5.828.836.000,-
3. Belanja Langsung, dari Anggaran Murni 2015 sebesar Rp 11.924.649.370,- selanjutnya mengalami perubahan menjadi Rp 11.565.024.270,- pada Anggaran Perubahan (APBD-P 2015).
4. Program SKPD terdiri dari 15 Program, yaitu 5 program yang sifatnya rutin (non urusan), 5 program yang menyangkut urusan sosial dan 5 program yang menyangkut urusan ketenagakerjaan.
5. Kegiatan SKPD terdiri dari 63 kegiatan, yang meliputi : 17 kegiatan rutin (non urusan), 20 kegiatan untuk urusan sosial, dan 26 kegiatan untuk urusan sosial.



Gambar. 2.1. Pengalokasian Anggaran Disnakersos 2015



DISNAKERSOS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

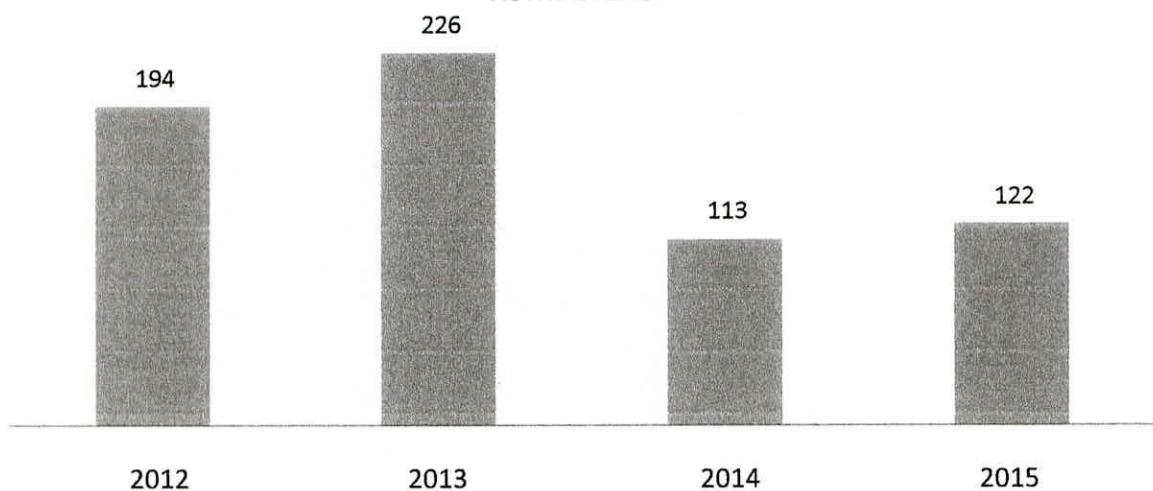
Sasaran	Indikator Kinerja Utama :
	<ul style="list-style-type: none"> a. Angka Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi b. Angka Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Perusahaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi indikator ke-1 adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja di Kota Balikpapan.

Pelaksanaan pelatihan Tenaga Kerja pada tahun 2015 ini, terdiri dari delapan jenis pelatihan : menjahit linen, Uji Tak Ruak (UTR), operator forklift, kecantikan dan tata rambut, otomotif roda empat, operator excavator loader, tata busana, dan teknisi komputer.

Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun ke -4 ini dari 132 orang yang diharapkan mengikuti pelatihan, dapat terealisasi sebanyak 122 orang. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi bertambah 7,96 % daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 92 %, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (40%), maka capaian kinerja saat ini kenaikannya sangat signifikan.

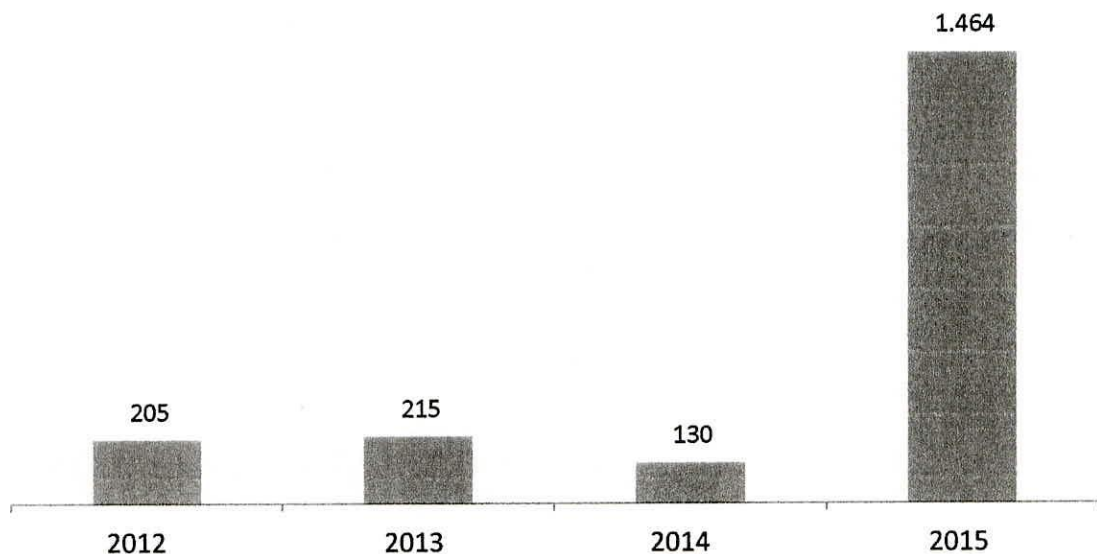
GRAFIK 3.1.
JUMLAH TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI



Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi indikator ke-2 adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan dua kegiatan unggulan, yaitu Job Market Fair dan Pelayanan Antar Kerja.

Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun ke -4 ini dari 1.718 lowongan kerja yang tersedia dapat ditempatkan sebanyak 1.464 orang tenaga kerja, sehingga capaian kinerja penempatan tenaga kerja 85 %. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran kinerja sebelumnya, maka pencapaian kinerja pada Tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Balikpapan masih cukup tinggi (7,58 %) daripada TPT Provinsi Kalimantan Timur (6,8 %).

GRAFIK. 3.2.
ANGKA TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI PERUSAHAAN



Indikator Kinerja Utama :

Angka Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan Di Perusahaan

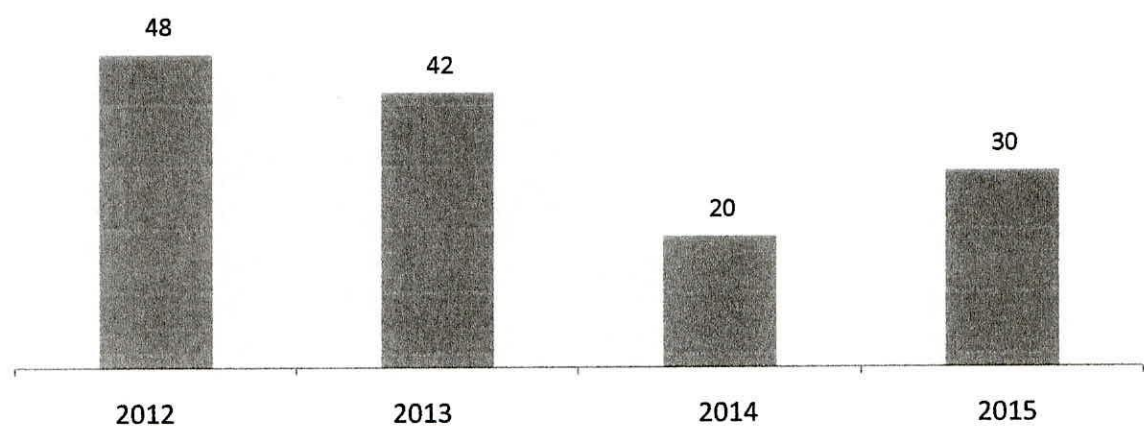
Kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang diproyeksikan pada tahun 2015 sebanyak 130 kasus. Sesuai dengan hasil pengawasan jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 30 kasus, maka capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 23 %.

Hasil pengukuran indikator Angka Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan Di Perusahaan dari Tahun 2012 sampai 2015 jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan fluktuatif. Jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012, yaitu 48 kasus.

Menurunnya jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa kinerja pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma dan peraturan ketenagakerjaan cukup baik. Selama 4 tahun terakhir, Disnakersos Kota Balikpapan sangat intens menyelenggarakan beberapa kegiatan pembinaan dan pengawasan seperti : Kampanye Bulan K3, pemeriksaan pertama, berkala/kasus, pembinaan dan pengawasan norma kerja maupun norma K3, dan kegiatan sosialisasi terkait dengan penegakan hukum ketenagakerjaan. Berikut adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target penurunan jumlah kasus-kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan antara lain:

- a. Pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Tunjangan Hari Raya (THR),
- b. Pengawasan Potensi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja di Luar BPJS Kesehatan,
- c. Kampanye Bulan K3,
- d. Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan,
- e. Pemeriksaan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan,
- f. Penyelesaian Kasus Pengupahan dan Jamsostek,
- g. Pengawasan Norma K3 di Perusahaan.

GRAFIK 3.3.
ANGKA KASUS PELANGGARAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN
DI PERUSAHAAN



Indikator Kinerja Utama :

Angka Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Sasaran III merupakan tolok ukur kinerja SKPD dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang selaras dan harmonis. Hubungan industrial yang selaras dan harmonis dapat terwujud dengan minimalisasi terjadinya perselisihan hubungan industrial, artinya

semakin sedikit kasus perselisihan yang terjadi maka kinerja SKPD semakin meningkat. Sedikitnya jumlah kasus merupakan salah satu indikator bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial sudah memahami bagaimana strategi untuk menciptakan pola-pola hubungan yang selaras dan harmonis.

Terjadinya perselisihan hubungan industrial dipengaruhi multi faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perselisihan sebagaimana diungkapkan Patrick Quinn (2003) terdiri dari sejumlah elemen, yaitu : kerangka hukum, peran, dan sikap mitra sosial serta adat istiadat/ budaya masyarakat

Indikator angka perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD diproyeksikan dalam bentuk persentase dan tidak ada informasi kondisi pada Tahun 2015 sehingga menyulitkan pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan kondisi tersebut maka pengukuran terhadap pencapaian kinerja SKPD untuk indikator ini dilakukan berdasarkan jumlah perselisihan hubungan industrial yang terdata pada Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, khususnya pada Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pada Tahun 2015 target kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah 45 kasus. Kasus yang dapat diselesaikan dengan PB terealisasi 20 kasus, sehingga capaian kinerja pada tahun ini sebesar 44 % atau meningkat 10 % daripada tahun sebelumnya.

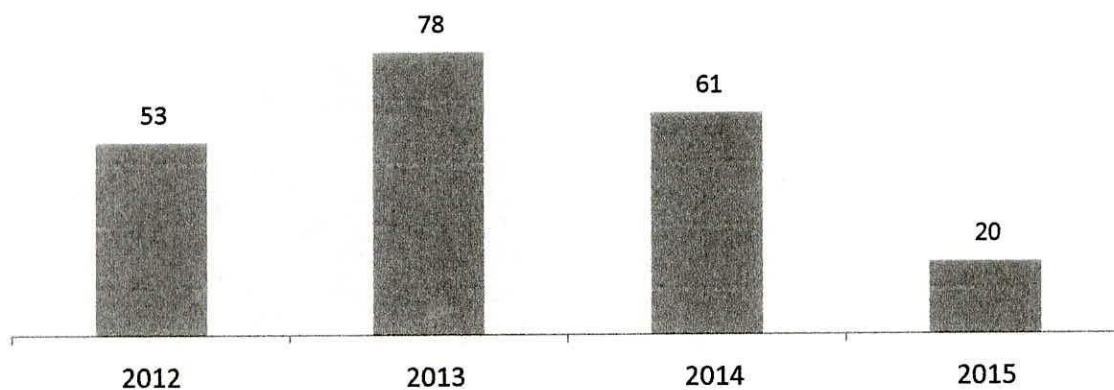
Pelaksanaan pembinaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang terselenggaranya pola-pola hubungan industrial yang selaras dan harmonis memberikan hasil yang cukup signifikan dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif di Kota Balikpapan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk menurunkan Angka Perselisihan Hubungan Industrial terdiri dari :

1. Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit);
2. Penyuluhan Peningkatan Pemahaman Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Di Dalam dan Di Luar Hubungan Kerja;
3. Penyuluhan terbentuknya Sarana Hubungan Industrial LKS Bipartit;
4. Pembinaan Syarat Kerja dan Outsourcing;

5. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan UMK;
6. Pembinaan Pengupahan;
7. Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi);
8. Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Ketenagakerjaan;
9. Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
10. Penyuluhan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.

GRAFIK 3.4.
ANGKA KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



Indikator Kinerja Utama :

Angka PMKS Yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

Sasaran IV adalah peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tolok ukur kinerja yaitu jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial.

Penetapan sasaran ke IV sudah searah dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, tepatnya pada sasaran strategis ke III, yaitu : “meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian”.

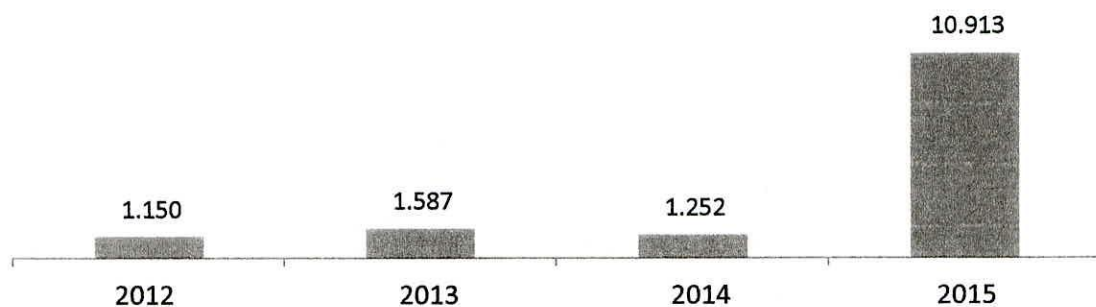
Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS dalam pengukuran capaian kinerjanya mempergunakan angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial sebagai tolok ukurnya, sedangkan di tingkat nasional tolok ukurnya mempergunakan jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melakukan aktivitas harian dan jumlah penerima manfaat yang terpenuhinya kebutuhan dasar.

Data PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2015 sebanyak 11.062 orang, target kinerja sebanyak 10.046 orang. Target tersebut dicapai melalui Program Pelayanan Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial, serta Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD terdiri atas :

1. Anak Balita Terlantar (ABT);
2. Anak Terlantar (ANTAR);
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
4. Anak Jalanan (Anjal);
5. Anak Yang Memerlukan Perlakuan Khusus (AMPK);
6. Lanjut Usia Terlantar;
7. Penyandang Cacat;
8. Tuna Susila;
9. Gelandangan;
10. Pengemis;
11. Bekas Warga Binaan lembaga Pemasyarakatan(BWLP);
12. Orang dengan HIV/AIDS;
13. Korban Penyalahgunaan Narkoba;
14. Korban Tindak Kekerasan;
15. Pekerja Migran dan Orang Terlantar di Perjalanan;
16. Korban Bencana Alam;
17. Korban Bencana Sosial;
18. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
19. Fakir Miskin;
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
21. Keluarga Berumah Tak Layak Huni.

GRAFIK 3.5.
ANGKA PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL



Hasil pengukuran indikator kinerja angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial pada tahun 2015 sebesar 99 %. Pada tahun 2015 ini data PMKS yang mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama :
Angka PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial

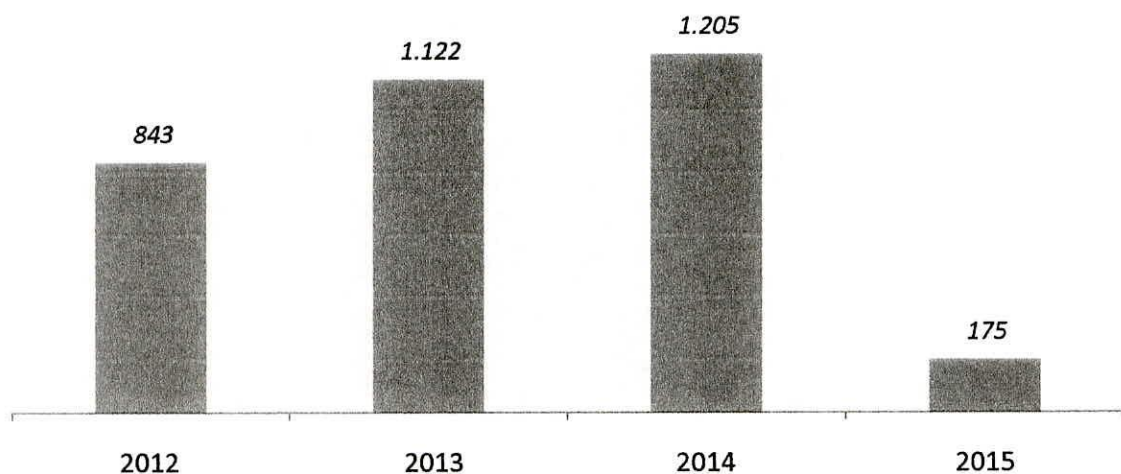
Sasaran V adalah peningkatan kemandirian PMKS dengan indikator kinerja angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial.

Program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Sasaran program pemberdayaan melalui bantuan UEP, yaitu : lanjut usia yang masih potensial dan memiliki usaha, keluarga miskin (usia 18 tahun sampai dengan 56 tahun), dan penyandang cacat yang potensial.

Target indikator kinerja utama pada tahun 2015 sebesar 175 orang, adapun jumlah yang diberikan bantuan melalui program-program pemberdayaan sebanyak 175 orang, sehingga capain kinerja 100 %.

GRAFIK 3.6.
ANGKA PMKS YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL



B. REALISASI ANGGARAN

Penganggaran kegiatan SKPD saat ini telah mempergunakan pola berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Pola dimaksud merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit organisasi semata, dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi. Pengkaitan biaya dengan *output* organisasi merupakan bagian integral dalam berkas atau dokumen anggaran.

Adanya keselarasan substansi antar dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan RKA/DPA) merupakan indikator yang perlu diperhatikan guna melihat apakah sistem penganggaran SKPD telah mempergunakan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Keselarasan indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD) dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan SKPD. Di samping persyaratan adanya indikator kinerja dan proses penyusunan anggaran yang memfasilitasi penggunaan indikator kinerja, persyaratan lainnya dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja yaitu adanya klasifikasi pengeluaran berdasarkan program (*program budget*) dan fleksibilitas yang lebih besar bagi manajer atau pejabat pelaksana anggaran.

Sesuai hasil monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan DPA SKPD yang dilaksanakan setiap bulan, maka realisasi anggaran Disnakersos Kota Balikpapan tahun 2015 secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1.	Pendapatan Asli Daerah (Retribusi IMTA)	Rp 540.000.000,00	Rp 459.166.200,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp 5.828.836.000,00	Rp5.645.228.860,00
3.	Belanja Langsung	Rp11.565.024.270,00	Rp8.024.307.322,00



DISNAKERSOS

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.

Dimasa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dan dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya LAKIP Tahun 2015 ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menuju terciptanya asas pemerintahan yang baik (*Good Government*), akuntabel serta transparan.

Balikpapan, 12 Februari 2016

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**



TIRTA DEWI

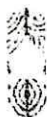
NIP. 19671123 198803 2 005



DISNAKERSOS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KOTA BALIKPAPAN



BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TIRTA DEWI**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 26 Januari 2015

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama

TIRTA DEWI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	i. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%
		ii. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	65%
2.	Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	46%
3.	Penurunan perselisihan hubungan industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	54%
4.	Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	80%
5.	Peningkatan kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	80%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Naker	Rp	1,267,415,000.00	
2. Program Penanggulangan Kemiskinan	Rp	428,045,000.00	
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	770,895,000.00	
4. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	1,970,428,200.00	
5. Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Rp	25,000,000.00	
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	1,699,010,000.00	
7. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp	810,000,000.00	
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	1,542,256,600.00	

Balikpapan, Januari 2015

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Wali Kota Balikpapan,



H.M. RIZAL EFFENDI

Kota Balikpapan



TIRTA DEWI
Pembina Tk. I

NIP. 19671123 198803 2 005

TABEL PENGUKURAN KINERJA 2015
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	239 orang	260 orang	282 orang	132 orang	194 orang	226 orang	113 orang	122 orang	81%	87%	40%	92%
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	500 orang	550 orang	600 orang	1.718 orang	205 orang	215 orang	130 orang	1.464 orang	41%	39%	22%	85%
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	74 kasus	72 kasus	71 kasus	130 kasus	48 kasus	42 kasus	20 kasus	30 kasus	65%	58%	28%	23%
3. Penurunan perselisihan hi	angka kasus perselisihan hi	205 kasus	192 kasus	182 kasus	45 kasus	53 kasus	78 kasus	61 kasus	20 kasus	26%	41%	34%	44%
4. Peningkatan Pelayanan & Perlindungan PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	6.064 jiwa	9.011 jiwa	8.297 jiwa	11.046 jiwa	1.150 jiwa	1.587 jiwa	1.252 jiwa	10.913 jiwa	19%	18%	15%	99%
5. Meningkatnya kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	5.272 jiwa	5.677 jiwa	6.083 jiwa	175 jiwa	843 jiwa	1.122 jiwa	1.205 jiwa	175 jiwa	16%	20%	20%	100%

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN 2015
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja
1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA : - Pelatihan tenaga kerja di Balikpapan	Rp 983.660.000	100%	Rp 830.740.000	84%
	2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA : - Job market fair (jmf) / pameran bursa kerja	Rp 319.500.000	100%	Rp 185.150.000	58%
		- Pelayanan antar kerja	Rp 102.430.000	100%	Rp 60.614.500	59%
2 peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN : - Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Rp 379.460.000	71%	Rp 261.541.500	69%
3. Penurunan perselisihan hi	angka kasus perselisihan hi	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN : - Penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial (mediasi)	Rp 102.935.600	80%	Rp 38.610.650	38%
		- Pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Rp 188.577.250	98%	Rp 147.585.000	78%
4 Peningkatan Pelayanan & Perlindungan PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL : - Rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa	Rp 240.491.000	77%	Rp 185.976.138	77%

Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja
		- Rehabilitasi anak jalanan (anjali), gelandangan, pengemis (gepeng) dan orang terlantar (ot)	Rp 380.647.000	60%	Rp 266.828.430	70%
		- Pengelolaan rumah perlindungan dan trauma center	Rp 215.580.000	65%	Rp 140.150.281	65%
		- Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila	Rp 58.402.000	5%	Rp 2.758.800	5%
		- Pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas	Rp 389.085.000	75%	Rp 293.780.007	76%
		- Pengelolaan Rumah rehabilitasi Sosial Anak	Rp 350.000.000	36%	Rp 126.067.800	36%
5 Meningkatnya kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL : - Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat - Pendamping dana dekonstruksi akses bagi pekerja sektor non formal - Pembinaan kelompok usaha bersama (kubek) Fasilitas pelaksanaan program keluarga harapan (pkh)	Rp 175.000.000 Rp 43.549.600 Rp 199.654.000 Rp 241.945.000	82% 90% 38% 100%	Rp 142.917.500 Rp 29.634.600 Rp 73.080.000 Rp 156.847.500	82% 68% 37% 65%

**LAPORAN MONITORING KEGIATAN APBD KOTA BALIKPAPAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2015**

INSTANSI : DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

NO. KODE	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		PROGNOSIS (Rp)	KETERANGAN	
				FISIK (%)	TTB. (%)	KEUANGAN				
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	540.000.000								
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	540.000.000								
4.1.2.03.11	Retribusi Izin Ketenagakerjaan / Bidang perizinan Tenaga Kerja Asing	540.000.000	100,00	89,19	89,19	492.677.800	91,24	47.322.200	Jumlah IMTA 37 Realisasi 34 Restitusi 1	
J U M L A H		540.000.000	100	89,19	89,19	492.677.800	91,24	47.322.200		

Balikpapan, 05 Januari 2016

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN



**LAPORAN MONITORING KEGIATAN APBD KOTA BALIKPAPAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN DESEMBER 2015**

INSTANSI : DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

NO. KODE	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
				FISIK (%)	TTB. (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan								
01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	2.420.210.000	41,52	97,76	40,59	2.365.883.660	40,59	54.326.340	
02.	Tunjangan Keluarga	287.485.000	4,93	82,18	4,05	236.243.294	4,05	51.241.706	
03.	Tunjangan Jabatan 1)	226.870.000	3,89	90,91	3,54	206.245.000	3,54	20.625.000	
04.	Tunjangan Fungsional	25.526.000	0,44	90,91	0,40	23.205.000	0,40	2.321.000	
05.	Tunjangan Fungsional Umum	70.642.000	1,21	100,15	1,21	70.750.000	1,21	(108.000)	
06.	Tunjangan Beras 1)	149.614.000	2,57	92,23	2,37	137.984.820	2,37	11.629.180	
07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.685.000	0,87	87,03	0,76	44.112.747	0,76	6.572.253	
08.	Pembulatan Gaji	141.000	0,00	38,54	0,00	54.339	0,00	86.661	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS								
01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	247.100.000	4,24	96,11	4,07	237.500.000	4,07	9.600.000	
06.	Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja	2.323.563.000	39,86	99,12	39,51	2.303.000.000	39,51	20.563.000	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah								
032.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	27.000.000	0,46	75,00	0,35	20.250.000	0,35	6.750.000	
J U M L A H		5.828.836.000	100		96,85	5.645.228.860	96,85	183.607.140	

Balikpapan, 05 Januari 2016

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**



**LAPORAN MONITORING KEGIATAN APBD KOTA BALIKPAPAN
BULAN DESEMBER 2015**

INSTANSI : DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.392.979.620							
		01. Kode Rekening 1.14.1.14:01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.475.000	6.475.000	0,06	50,00	0,03	2.208.000	0,02	4.267.000	belanja paket pengiriman
		02. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	78.000.000	0,67	100,00	0,67	18.970.118	0,16	59.029.882	belanja telpon
		03. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	28.100.000	28.100.000	0,24	65,52	0,16	8.856.300	0,08	19.243.700	jasa pembayaran pajak
		04. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.000.000	130.000.000	1,12	92,51	1,04	120.263.000	1,04	9.737.000	brg yg nilainya < 1 jt
		05. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	212.535.120	212.535.120	1,84	49,72	0,91	105.683.200	0,91	106.851.920	blanko-blanko utk bidang
		06. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.057.000	27.057.000	0,23	60,40	0,14	16.171.000	0,14	10.886.000	
		07. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman	207.400.000	207.400.000	1,79	76,00	1,36	157.267.500	1,36	50.132.500	mamin pegawai & rapat
		08. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	375.000.000	375.000.000	3,24	83,33	2,70	290.648.115	2,51	84.351.885	
		09. Kode Rekening 1.14.1.14:01.01.019 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	300.873.600	328.412.500	2,84	82,79	2,35	269.072.500	2,33	59.340.000	naban mengundurkan diri

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.099.150.000							
		10. Kode Rekening 1.14.1.14:01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	350.000.000	350.000.000	3,03	100,00	3,03	321.030.000	2,78	28.970.000	hasil negosiasi
		11. Kode Rekening 1.14.1.14:01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	169.050.000	169.050.000	1,46	80,60	1,18	136.353.700	1,18	32.696.300	alat ukur tes kepribadian
		12. Kode Rekening 1.14.1.14:01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	303.100.000	303.100.000	2,62	91,30	2,39	276.500.000	2,39	26.600.000	pengadaan cctv
		13. Kode Rekening 1.14.1.14:01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	171.450.000	171.450.000	1,48	66,67	0,99	100.903.986	0,87	70.546.014	biaya-penggantian suku cadang
		14. Kode Rekening 1.14.1.14:01.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	105.550.000	105.550.000	0,91	60,00	0,55	63.239.800	0,55	42.310.200	jasa pindah kantor & pemeliharaan komp & jaringan
		III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		30.500.000							
		15. Kode Rekening 1.14.1.14:01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30.500.000	30.500.000	0,26	100,00	0,26	29.500.000	0,26	1.000.000	
		IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		50.730.000							
		16. Kode Rekening 1.14.1.14:01.05.067 Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan dan Sosial	50.730.000	50.730.000	0,44	100,00	0,44	50.590.000	0,44	140.000	
		V. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI		64.400.000							
		17. Kode Rekening 1.14.1.14:01.08.015 Pengelolaan informasi ketenagakerjaan dan sosial	64.400.000	64.400.000	0,56	94,38	0,53	61.506.000	0,53	2.894.000	
		VI. PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL		25.000.000							
		18. Kode Rekening 1.14.1.14:01.12.003 Verifikasi usulan hibah dan bantuan sosial bidang ketenagakerjaan dan sosial	25.000.000	25.000.000	0,22	30,00	0,06	3.873.800	0,03	21.126.200	mamin, perjadin

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VII. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		1.849.115.000							
		19. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.013 Rehabilitasi sosial penderita gangguan jiwa (orgif)	210.041.000	240.491.000	2,08	77,40	1,61	185.976.138	1,61	54.514.862	-penghematan ongkos perjalanan mengantar Orgif
		20. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.014 Rehabilitasi anak jalanan (anjai), gelandangan, pengemis (gepeng) dan orang terlantar (ot)	376.572.000	380.647.000	3,29	60,00	1,97	266.828.430	2,31	113.818.570	honor, transkom,perjadin
		21. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.020 Pengelolaan data penerima bantuan iur (PBI)	214.910.000	214.910.000	1,86	45,00	0,84	97.143.250	0,84	117.766.750	honor, transkom, perjadin
		22. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.021 Askesos lansia terlantar	300.000.000	-	-	0,00	0,00	0	0,00	-	
		23. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.022 Pengelolaan rumah perlindungan dan trauma center	150.000.000	215.580.000	1,86	65,00	1,21	140.150.281	1,21	75.429.719	honor, byr listrik, mamin
		24. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.023 Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila	58.402.000	58.402.000	0,50	5,00	0,03	2.758.800	0,02	55.643.200	-Sesuai penerbitan Satpol PP (20 orang) belum ada penambahan
		25. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.024 Pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas	389.085.000	389.085.000	3,36	75,35	2,54	293.780.007	2,54	95.304.993	bhn praktek, mamin, perjadin
		26. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.025 Pengelolaan Rumah rehabilitasi Sosial Anak	-	350.000.000	3,03	35,90	1,09	126.067.800	1,09	223.932.200	mamin korban
		VIII. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO		396.231.000							
		26. Kode Rekening 1.13.1.14.01.19.009 Pembinaan dan peningkatan sarana lembaga kesejahteraan sosial:(LKS)	322.900.000	322.900.000	2,79	83,31	2,27	262.555.600	2,27	60.344.400	perjadin, brg u phk k-3
		27. Kode Rekening 1.13.1.14.01.19.010 Ded panti wreda dan penampungan pmks	137.100.000	-	-	0,00	0,00	0	0,00	-	- dirasionalisasikan
		28. Kode Rekening 1.13.1.14.01.19.011 Peningkatan sdm dan sarana prasarana lembaga kesejahteraan sosial	350.000.000	73.331.000	0,63	0,00	0,00	0	0,00	73.331.000	tidak dilaksanakan km kekurangan waktu & SDM

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		IX. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		423.149.600							
		29. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	175.000.000	175.000.000	1,51	81,67	1,24	142.917.500	1,24	32.082.500	sertifikat, transkom, perjadin, mamin,honor
		30. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.007 Pendamping dana dekonstruksi askesos bagi pekerja sektor non formal	43.549.600	43.549.600	0,38	90,00	0,34	29.634.600	0,26	13.915.000	honor
		31. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.009 Pelatihan pematapan pekerja sosial masyarakat (PSM)	104.600.000	104.600.000	0,90	60,82	0,55	62.463.500	0,54	42.136.500	efisiensi perjadin
		32. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.010 Pembinaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Balikpapan	100.000.000	100.000.000	0,86	86,30	0,75	86.604.200	0,75	13.395.800	efisiensi perjadin
		X. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN		1.119.107.000							
		33. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.001 Pembinaan kelompok usaha bersama (kub)	199.654.000	199.654.000	1,73	38,11	0,66	73.080.000	0,63	126.574.000	efisiensi perjadin dan jasa narasumber
		34. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.007 Pembinaan taruna siaga bencana (tagana)	484.061.500	484.061.500	4,19	100,00	4,19	387.377.700	3,35	96.683.800	makan minum kegiatan, perjadin
		35. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.008 Penyuluhan sosial tentang pmks dan psks	91.640.000	91.640.000	0,79	95,51	0,76	87.524.000	0,76	4.116.000	
		36. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.009 Bimbingan teknis kader inti karang taruna (tikar) kota Balikpapan	101.806.500	101.806.500	0,88	76,46	0,67	77.840.100	0,67	23.966.400	cetak, makan minum,perjadin, narasumber
		37. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.010 Fasilitas pelaksanaan program keluarga harapan (pkh)	241.945.000	241.945.000	2,09	100,00	2,09	156.847.500	1,36	85.097.500	honor, tranport & akomodasi, perjadin
		XI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA		1.267.415.000							
		38. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.010 Pelatihan tenaga kerja di Balikpapan	983.660.000	983.660.000	8,51	100,00	8,51	830.740.000	7,18	152.920.000	honor, makan minum, biaya kontribusi (85 jt)
		39. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.053 Pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan terdidik	81.000.000	81.000.000	0,70	59,00	0,41	47.782.500	0,41	33.217.500	transprt, akomodasi, cetak, makan minum, perjadin
		40. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.054 Bimtek perencanaan tenaga kerja	202.755.000	202.755.000	1,75	100,00	1,75	113.656.500	0,98	89.098.500	honor, atk, sertifikat, spanduk, transkom narsum, perjadin, jasa narsum

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		XII. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA		770.895.000							
		41. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.002 Job market fair (jmf) / pameran bursa kerja	319.500.000	319.500.000	2,76	100,00	2,76	185.150.000	1,60	134.350.000	trankom, sewa meja kursi, sound, makan minum,perjadin,jasa narsum
		42. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.005 Pembinaan lembaga pelatihan kerja (lpk)	55.190.000	55.190.000	0,48	100,00	0,48	42.600.600	0,37	12.589.400	honor, transkom, mamin, narsum
		43. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.018 Apprentice market fair/ bursa pemagangan	138.750.000	138.750.000	1,20	100,00	1,20	53.342.800	0,46	85.407.200	honor,sertifikat, sewa gedung &alat, mamin
		44. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.019 Sosialisasi pemagangan dalam negeri	46.525.000	46.525.000	0,40	100,00	0,40	29.556.100	0,26	16.968.900	honor, transkom,mamin
		45. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.020 Penyuluhan bimbingan jabatan dan bursa kerja khusus	108.500.000	108.500.000	0,94	100,00	0,94	82.487.000	0,71	26.013.000	honor, barang jasa(alat peserta, perjadin), transkom & jasa narsum
		46. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.021 Pelayanan antar kerja	102.430.000	102.430.000	0,89	100,00	0,89	60.614.500	0,52	41.815.500	honor, barang jasa (cetak, transkom, narsum, pemeliharaan komp & jaringan)
		XIII. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN		2.439.296.050							
		47. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.008 Pembinaan pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan	123.500.000	-	-	0,00	0,00	0	0,00	-	-Dirasionalisasikan
		48. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.012 Kampanye bulan keselamatan dan kesehatan kerja (k3)	140.537.700	140.537.700	1,22	100,00	1,22	115.322.000	1,00	25.215.700	honor, perjadin & jasa tenaga ahli
		49. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.027 Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	379.460.000	379.460.000	3,28	71,25	2,34	261.541.500	2,26	117.918.500	honor, cetak, perjadin, jasa tenaga ahli.
		50. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.033 Penanggulangan dan kordinasi penanganan kerawanan ketenagakerjaan	95.405.000	95.405.000	0,82	60,00	0,49	42.460.000	0,37	52.945.000	honor
		51. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.034 Penyelesaian perkara penyelesaian hubungan industri (mediasi)	102.935.600	102.935.600	0,89	80,00	0,71	38.610.650	0,33	64.324.950	honor, perjadin

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		52. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.036 Pengendalian dan koordinasi dewan pengupahan dalam penetapan umk	205.602.500	205.602.500	1,78	91,50	1,63	188.077.100	1,63	17.525.400	honor, perjadi
		53. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.037 Pembinaan syarat kerja dan outsourcing	96.535.000	96.535.000	0,83	75,00	0,63	38.730.900	0,33	57.804.100	honor, perjadi
		54. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.038 Pengendalian dan kordinasi lembaga kerjasama tripartit (lks) tripartit	166.795.000	166.795.000	1,44	82,50	1,19	120.991.145	1,05	45.803.855	honor, transkom, mamin, jasa narsum, perjadi
		55. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.039 Pemasarakatan hubungan industrial	182.411.000	182.411.000	1,58	89,00	1,40	150.465.450	1,30	31.945.550	honor, mamin, jasa ahli
		56. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.042 Pembinaan dan pengawasan norma kerja	134.500.000	134.500.000	1,16	91,67	1,07	83.600.200	0,72	50.899.800	mamin,perjadi
		57. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.043 Pembinaan dan pengawasan norma k3	192.980.000	192.980.000	1,67	80,00	1,33	110.757.300	0,96	82.222.700	honor, jasa publikasi,mamin, perjadi
		58. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.044 Pembinaan, pencegahan dan penyelesaian HI	188.577.250	188.577.250	1,63	98,00	1,60	147.585.000	1,28	40.992.250	honor, trnskom, narsum, mamin
		59. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.045 Sosialisasi norma pengupahan	148.085.000	148.085.000	1,28	85,00	1,09	84.608.042	0,73	63.476.958	honor, mamin, perjadi,jasa ahli
		60. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.046 Pembinaan pelaksanaan perundang-undangan bidang pengupahan dan bpjs	235.705.600	235.705.600	2,04	86,36	1,76	84.988.210	0,73	150.717.390	honor, transkom, cetak, mamin, tenaga ahli
		61. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.047 Pengawasan pelaksa ketentuan perundang-undangan bidang pengupahan dan bpjs	169.766.400	169.766.400	1,47	70,83	1,04	19.417.700	0,17	150.348.700	honor, perjadi
		XIV. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN		428.045.000				0			
		62. Kode Rekening 1.14.1.14.01.18.001 Pelatihan tenaga kerja bagi gakin	428.045.000	428.045.000	3,70	100,00	3,70	402.350.000	3,48	25.695.000	honor, cetak, mamin,tenaga ahli, biaya kontribusi

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD		BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		XV. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		209.011.000							
		63. Kode Rekening 1.19.1.14.01.17.007 Pelaksanaan peringatan hari pahlawan	209.011.000	209.011.000	1,81	84,41	1,53	176.685.700	1,53	32.325.300	transkom, sewa peralatan, perjadin
J U M L A H			11.924.649.370	11.565.024.270	100		81,64	8.024.307.322	69,38	3.540.716.948	

BALIKPAPAN, 05 JANUARI 2016

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN


TIRTA DEWI

NIP. 19671123 198803 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman RT. 10 NO. 02 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota
BALIKPAPAN

<http://disnakersos.balikipapan.go.id>

Kode Pos : 76112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.46 / 036 / DISNAKERSOS

TENTANG

TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2016

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2016 perlu membentuk tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016, dengan susunan personel sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2016;
 2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2016.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 4 Januari 2016

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 188.46/ 036 /DISNAKERSOS
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) DINAS
 TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN 2016

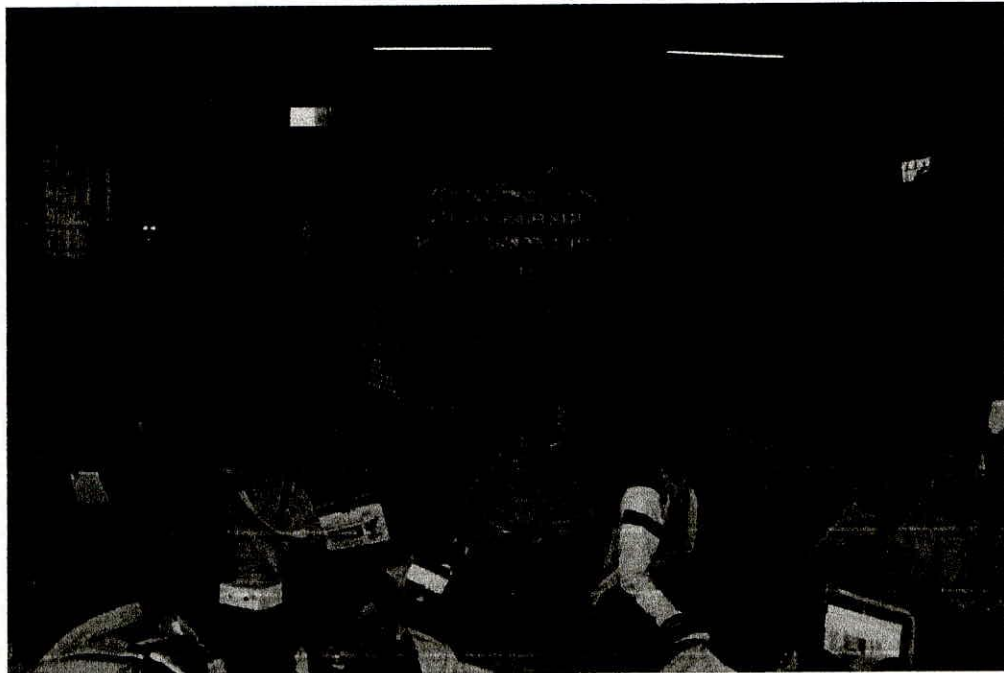
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN 2016

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	TIRTA DEWI, S.Sos, M.AP NIP. 19671123 198803 2 005	Ketua
2	ASFIANSYAH, SE NIP. 19611105 198611 1 002	Sekretaris
3	BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Si NIP. 19650123 199403 1 005	Anggota
4	Dra. ASNI BUDIARSIH NIP. 19581018 198903 2 001	Anggota
5	Drs. BAMBANG SURONO NIP. 19581224 198203 1 011	Anggota
6	Drs. IRWAN FAHRONI NIP. 19590321 199203 1 002	Anggota
7	ALIFA HASNGGA WURI HANSI, S.Hut, MH NIP. 19770722 200604 2 014	Anggota
8	SULISMONO, S.Pd NIP. 19640208 200012 1 001	Anggota
9	SUGIOTO, SH NIP. 19590725 198101 1 003	Anggota
10	IRA TRI SUSANTI NIP. 19730621 200604 2 005	Anggota
11	NISWATY, SH, M.AP NIP. 19630820 199203 2 007	Anggota
12	M. NAWIR, B.Sc NIP. 19590810 198303 1 024	Anggota
13	RACHMAN HADI SAPUTRA NIP. 19780823 200604 1 009	Anggota
14	BAHRIAN, S.ST NIP. 19690629 199212 1 001	Anggota
15	ANDI HASRAH, B.Sw NIP. 19630207 199103 2 007	Anggota
16	TUKIYO, S.Sos NIP. 19671210 199212 1 001	Anggota
17	MOCHAMAD GUFRON,SH. NIP. 19820217 201503 1 002	Anggota

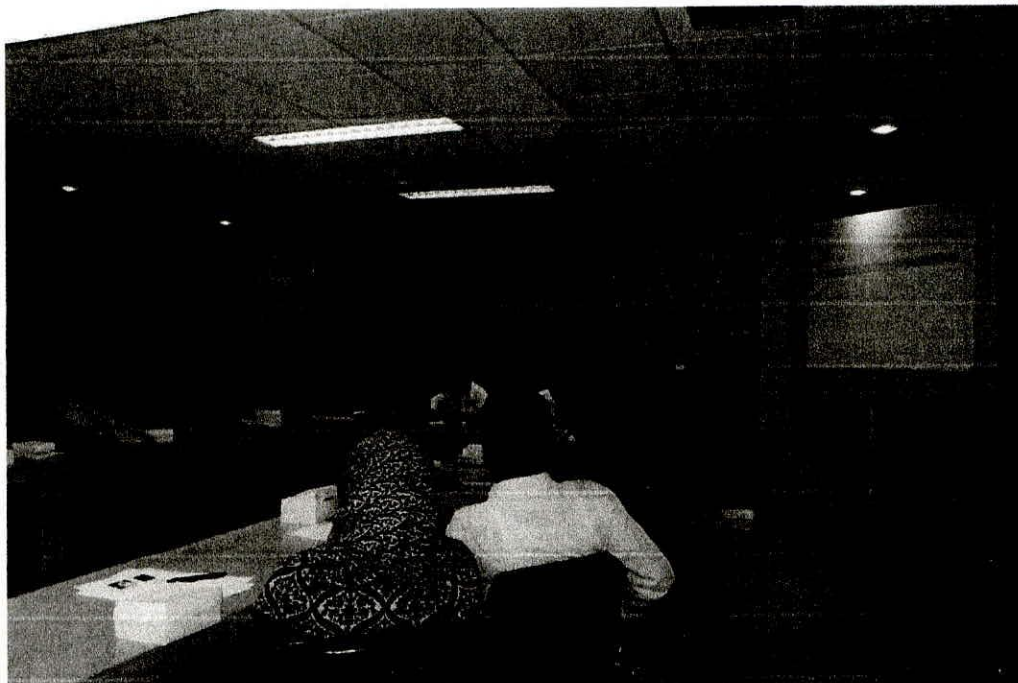
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
 KOTA BALIKPAPAN



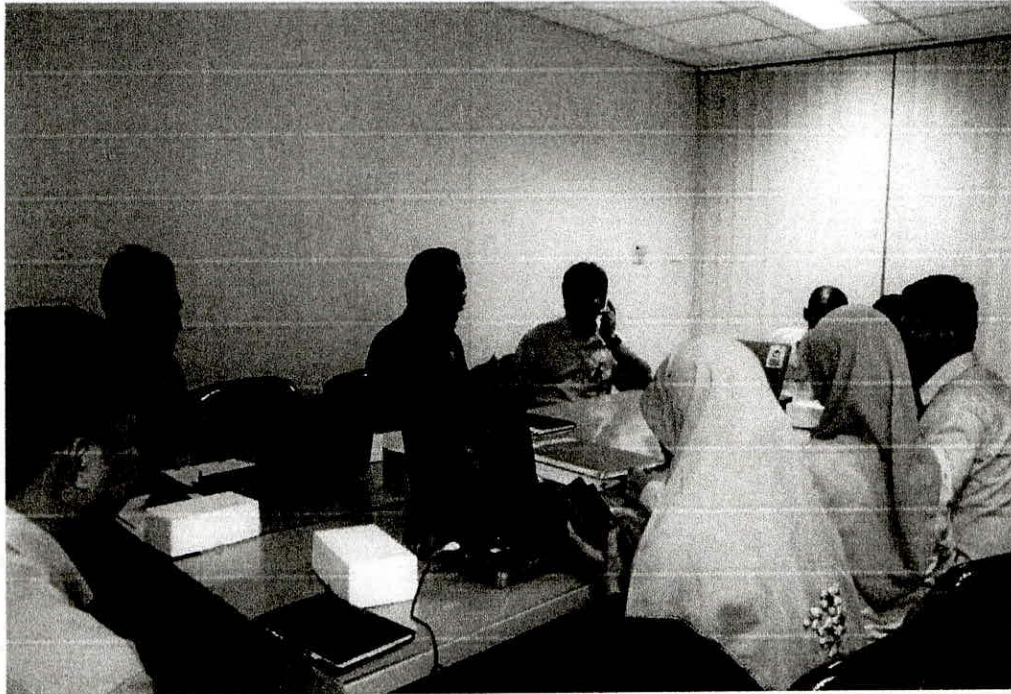
DOKUMENTASI KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015



Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Siswa Siswi Smk Pangeran Antasari 2015



Pembinaan Aturan Perundangan bagi Pekerja Perempuan di Perusahaan



Kegiatan Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan dan Sosial - Pelatihan Operator dan Administrator Web Site Disnakersos (Maret 2015)



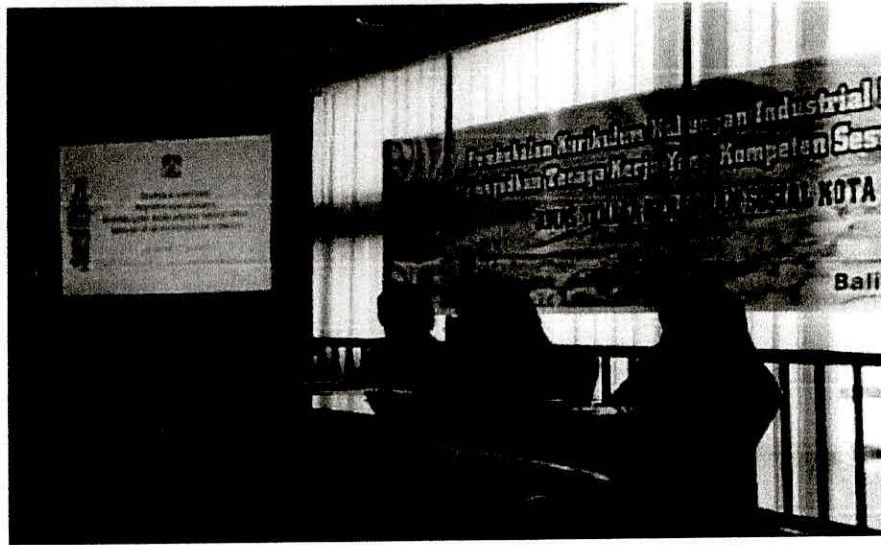
Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan (Pengawasan 2015)



Sosialisasi Tata Cara Perijinan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Penta 2015)



Bulan K3 2015



Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum Hubungan Industrial Pada Perguruan (9 Juni 2015).



Sosialisasi Askessos (02 April 2015)



Sosialisasi Struktur Dan Skala Upah Tahun 2015
(26 Mei 2015)